



Danang: Politis, Bukan karena Korona

Tidak Kuorum, Rapur DPRD Kota Jogja Akhirnya Ditunda

JOGJA, Radar Jogja – Rapat paripurna perdana DPRD Kota Jogja, di masa tanggap darurat korona, Senin (30/3) sore batal digelar. Karena tidak kourum. Hanya 20 anggota DPRD Kota Jogja yang hadir, dari minimal 21 anggota yang hadir supaya kuorum.

Sesuai yang sudah dijadwalkan, rapur kemarin mengendakan penetapan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD serta rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPI) Wali Kota Jogja tahun anggaran 2019. Dijadwalkan mulai pukul 15.00, tapi setelah ditunda hingga pukul 18.00, tetap tidak kuorum. Hingga

akhirnya dibatalkan.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko menyebut, batalnya rapur kemarin bukan karena takut penyebaran virus korona. Tapi pilihan politik. Itu karena ada dua fraksi, yaitu Nadsem dan PKS, yang semua anggotanya fraksinya tidak hadir. "Bukan takut korona, tapi pilihan politis fraksi," kata Danang, kemarin (31/3).

Pernyataannya tersebut juga didasari anggota fraksi yang tidak hadir, saat bersamaan justru membagikan foto di media sosial kegiatannya melakukan penyemprotan disinfektan. "Kalau takut korona kok malah turun ke masyarakat nyemprot disinfektan. Padahal dia ketua pansus LKPI," sindir Danang sambil menunjukkan foto aktivitas anggota DPRD Kota Jogja itu.

Politikus PDIP itu menambah-



DANANG R



Bambang Anjar J

kan, dengan batalnya rapur kemarin berimbas pada pokir DPRD terancam tidak bisa dimasukkan dalam RKPD DPRD Kota Jogja 2020. Maupun dalam pembahasan dalam Musrenbang, yang direncanakan dimulai 7 April nanti. "Untuk LKPI sesuai aturan jika 30 hari tidak ada respon dari DPRD dinyatakan diterima," ungkapnya.

Terkait dengan pelaksanaan protokol pencegahan korona,

Danang mengaku sudah menjalankannya. Yaitu membatasi peserta rapat maksimal 30 orang. Sebelum masuk ruangan juga wajib cuci tangan. Saat rapur juga sudah diatur yang di dalam ruangan hanya dua anggota tiap fraksi sebagai perwakilan. Pimpinan dewan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekda serta tiga Asisten Sekda dan OPD terkait. "Hanya perwakilan OPD terkait rapat yang dibahas yang



BADARI JOGJA FILE

Sigit Wicaksono

masuk," jelasnya.

Ketika dikonfirmasi Ketua Fraksi PKS Bambang Anjar Jalu-murti mengatakan, sejak awal mendukung gerakan *social distancing*. Di antaranya dengan mendorong setwan menggelar *teleconference*. Selain itu, FPKS menilai pansus pokir, yang lampirannya sampai lebih dari 2.700 kegiatan, jika dipaksakan semua harus masuk sebagai lampiran untuk diakomodasi

dalam APBD 2021 momen-tumnya tidak tepat. "Di tengah pandemi korona ini maka ang-garan APBD harus difokuskan, bahkan perlu redesain untuk penanganan korona," tuturnya.

FPKS menilai pokir bisa di-*rescheduling* pada 2022. Un-tuk program masyarakat tidak akan terpengaruh karena has-il musrenbang dari tingkat kelu-raham sampai kecamatan tetap diakomodir dalam musrenbang kota sebagai dasar penyusunan program dan anggaran 2021. "Hanya yg lewat DPRD sedikit ditunda sampai masalah koro-na selesai. Kami mulai melihat kebutuhan masyarakat terdamp-ak korona ini mulai muncul," ungkapnya.

Bambang menyebut, selain kesehatan adalah masalah eko-nomi yang berimbas pada kebu-tuhan pokok yang mulai keku-rangan. Karena itu APBD bisa

difokuskan untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan logis-tik sembako bagi warga yang membutuhkan. Terutama yang pekerjaannya dan penghasilanya harian, seperti tukang becak, ojek, pedagang kecil, dan lainnya di sektor informal. "Mereka mulai menjerit dan butuh kepedulian semua, *masak* mau memaksakan pokir dengan mengalahkan ke-butuhan masyarakat," ujarnya.

Hal yang sama juga disampa-ikan Ketua Fraksi Nasdem Sigit Wicaksono, yang menyebut ketidakhadiran seluruh anggo-tanya karena alasan teknis. Bukan politis. Yaitu sebagai antisipasi penyebaran virus korona. Menurut dia, dalam kondisi darurat saat ini jangan menggunakan aturan normatif. "Kita mendorong warga untuk *social distancing*, *stay at home*, tapi malah tidak memberikan contoh," ujarnya. (pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005